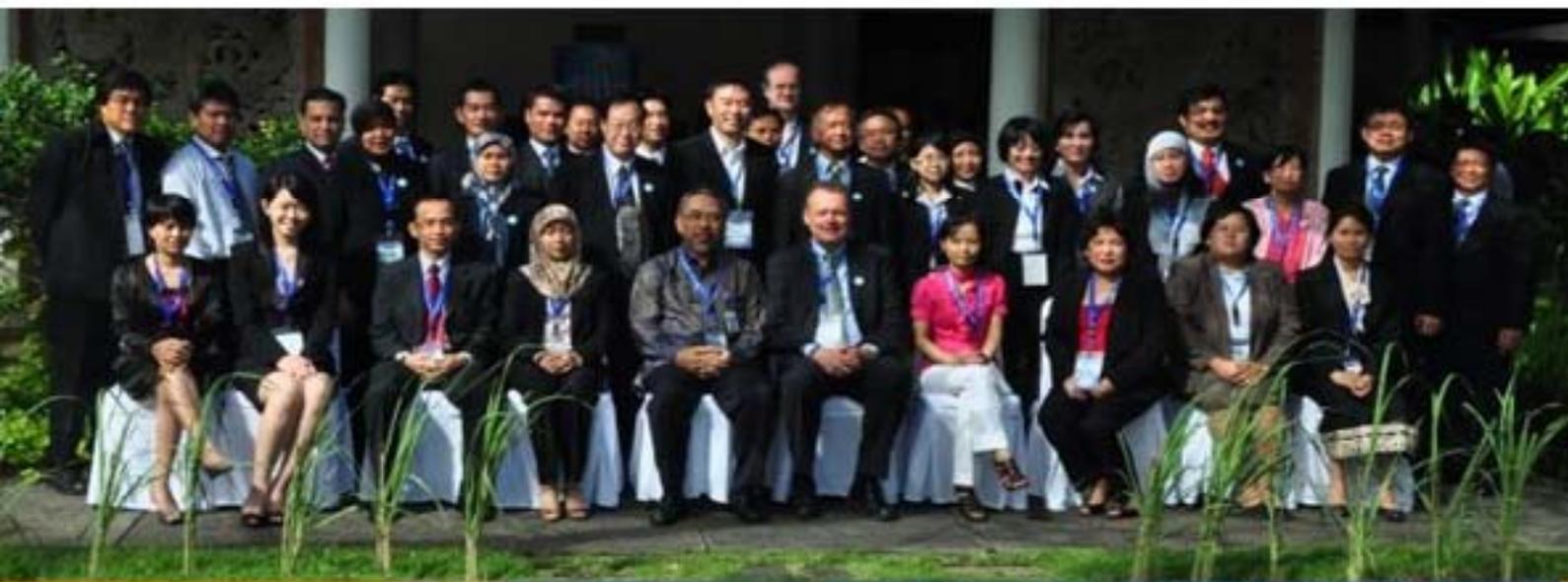
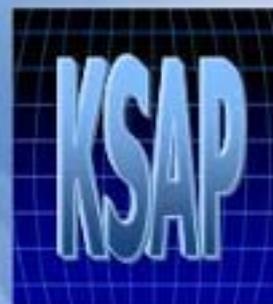


LAPORAN TAHUNAN 2010



BALI - INDONESIA



**KOMITE STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN
GOVERNMENTAL ACCOUNTING STANDARDS COMMITTEE**



ACCOUNTABILITY

TRANSPARENCY



**KOMITE STANDAR
AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

LAPORANTAHUNAN

2010

ACCOUNTABILITY

TRANSPARENCY

**SAMBUTAN
KETUA KOMITE KONSULTATIF
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) mengemban tugas yang berat dalam menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang harus diterapkan oleh Pemerintah Pusat maupun pemerintah daerah. Standar tersebut disusun dengan memperhatikan konsep, prinsip, dan praktik akuntansi yang baik, serta mudah dipahami bagi para pengguna sehingga dapat diimplementasikan dengan baik dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah.

Tahun 2010 ini merupakan tahun bersejarah bagi KSAP karena telah berhasil menyelesaikan SAP Berbasis Akruwal yang kemudian ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. PP Nomor 71 Tahun 2010 merupakan peraturan pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Di dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 diatur mengenai SAP Berbasis Akruwal (Lampiran I) maupun SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal (Lampiran II), hal ini dimaksudkan sebagai langkah strategis untuk persiapan secara bertahap penerapan SAP Berbasis Akruwal yang paling lambat diterapkan untuk pelaporan keuangan tahun anggaran 2014.

Selain itu, pada tahun 2010, KSAP juga melaksanakan tugas-tugas terkait dengan implementasi SAP Berbasis Kas Menuju Akruwal (*cash towards accrual*), seperti penyusunan Buletin Teknis berserta sosialisasinya kepada unit-unit instansi di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Rencana kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh KSAP selama tahun 2010 tersebut telah disusun dengan lengkap dan sistematis dalam Laporan Tahunan KSAP 2010, agar dapat menjadi media akuntabilitas dan transparansi kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*), khususnya Presiden RI melalui Menteri Keuangan.

Kami mengucapkan terima kasih kepada para anggota Komite Konsultatif atas saran-saran yang telah diberikan kepada KSAP dalam melaksanakan tugasnya selama ini, dan kepada para anggota Komite Kerja KSAP yang telah bekerja secara profesional dalam menyusun, mengembangkan, dan membantu implementasi SAP. Demikian juga kepada Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP, serta pihak-pihak lain yang mendukung keberhasilan penyusunan dan implementasi SAP.

Semoga Laporan Tahunan 2010 ini dapat menjadi bahan evaluasi dan peningkatan kinerja KSAP pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, Maret 2011

Direktur Jenderal Perbendaharaan
Selaku Ketua Komite Konsultatif,

Agus Suprijanto

**PENGANTAR
KETUA KOMITE KERJA
STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**



Laporan Tahunan 2010 ini disusun sebagai media transparansi dan akuntabilitas atas pelaksanaan tugas dan kegiatan KSAP kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, dan hasil yang dicapai KSAP selama tahun 2010.

KSAP terus berupaya mendorong implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) melalui sosialisasi, lokakarya (*workshop*), *Training of Trainers* (TOT), pelayanan publik, *help desk*, serta penyusunan Buletin Teknis dan Interpretasi Pernyataan SAP.

Selama tahun 2010, KSAP telah menyelesaikan SAP Berbasis Akruwal yang terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan 12 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP). SAP Berbasis Akruwal tersebut telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 22 Oktober 2010. Pada akhir tahun 2010, PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut telah mulai disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan. Dengan diterbitkannya SAP Berbasis Akruwal tersebut, maka KSAP mempunyai tugas untuk ikut mendorong implementasi SAP tersebut.

Tahun 2010 ini, KSAP telah menyelenggarakan *international events*, yaitu “*The Meeting of Governmental Accounting Standards Setters of ASEAN Member Countries*.” Acara tersebut diikuti oleh 9 negara ASEAN dan 3 negara sebagai pengamat. Selain itu, tahun ini pula KSAP dipercaya sebagai tuan rumah penyelenggara *IPSAS Board Meeting*.

Dalam rangka meningkatkan kualitas informasi yang disajikan, Laporan Tahunan 2010 ini juga telah memuat informasi keuangan KSAP tahun 2010.

Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para anggota Komite Konsultatif, para anggota Komite Kerja, Kelompok Kerja, dan Sekretariat KSAP yang telah mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk KSAP.

Kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pemangku kepentingan agar dalam pelaksanaan kegiatan KSAP pada tahun-tahun berikutnya dapat lebih baik.

Jakarta, Maret 2010
Ketua Komite Kerja,

Binsar H. Simanjuntak

DAFTAR ISI

Sambutan Ketua Komite Konsultatif	1
Sambutan Ketua Komite Kerja.....	2
Daftar Isi.....	3
Bab I Pendahuluan.....	4
A.Organisasi dan Kedudukan KSAP	4
B.Tugas Pokok KSAP	6
Bab II Rencana Kerja KSAP	8
A.Kondisi Umum	8
B.Rencana Strategis.....	9
Bab III Kinerja KSAP	15
A.Capaian Kinerja.....	15
B.Pelaksanaan Kegiatan	16
C.Aspek Keuangan.....	23
D.Kendala dan Strategi Pemecahannya.....	23
Bab IV Rencana Kerja Tahun 2010	24
Bab V Penutup.....	26

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara/daerah, pemerintah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD berupa laporan keuangan. Bentuk dan isi laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Sesuai dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, SAP disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen. Ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa KSAP dibentuk dengan Keputusan Presiden (Keppres). Untuk memenuhi ketentuan tersebut telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan pada tanggal 5 Oktober 2004 yang sebagaimana diubah terakhir dengan Keppres Nomor 3 tahun 2009.



Komite Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan komite independen yang bertugas untuk menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan Republik Indonesia

A. Organisasi dan Kedudukan KSAP

KSAP yang dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 84 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Keppres Nomor 3 Tahun 2009 adalah organisasi yang bersifat independen. Independensi tersebut meliputi keanggotaan, mekanisme dalam pelaksanaan pekerjaan, dan proses penyusunan PSAP (*due process*). KSAP beranggotakan kalangan profesional yang berasal dari lingkungan pemerintah, praktisi akuntansi, asosiasi profesi akuntan, dan akademisi yang kompeten di bidang akuntansi sektor publik. Dalam melaksanakan tugasnya, KSAP dapat bekerja sama dengan lembaga pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan atau pihak terkait lainnya.

Secara lengkap susunan Komite Konsultatif dan Komite Kerja KSAP sesuai Keppres Nomor 3 Tahun 2009 adalah:

Komite Konsultatif:

1. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Direktur Jenderal Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan sebagai Anggota;
4. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Akuntan Indonesia sebagai Anggota;
5. Prof. Dr. Mardiasmo, SE., Ak., MBA sebagai Anggota; dan
6. Prof. Dr. Wahjudi Prakarsa sebagai Anggota.

Komite Kerja:

1. Dr. Binsar H. Simanjuntak, CMA sebagai Ketua merangkap Anggota;
2. Drs. AB Trihartta, Ak., MM sebagai Wakil Ketua merangkap Anggota;
3. Sonny Loho, Ak., MPM sebagai Sekretaris merangkap Anggota;
4. Drs. Sugijanto, Ak., MM sebagai Anggota;
5. Dr. Hekinus Manao, M.Acc., CGFM sebagai Anggota;
6. Dr. Jan Hoesada, Ak., MM sebagai Anggota;
7. Yuniar Yanuar, Ak., MM sebagai Anggota;
8. Dr. Bambang Pamungkas, SE, Ak., MBA sebagai Anggota; dan
9. Dr. Dwi Martani, SE, Ak. sebagai Anggota;



*Anggota Komite Kerja KSAP dalam acara soft launching PP 71/2010 tentang SAP :
(ki-ka) Sonny Loho, Jan Hoesada, Dwi Martani, Yuniar Yanuar, AB. Trihartta, Binsar H.
Simanjuntak*

B. Tugas Pokok KSAP

Berdasarkan Keppres Nomor 3 Tahun 2009, KSAP bertugas mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Komite Konsultatif bertugas memberi konsultasi dan/atau pendapat dalam rangka perumusan konsep RPP SAP. Penyusunan konsep SAP ini secara operasional dilaksanakan oleh Komite Kerja. Dalam pelaksanaan tugasnya Komite Kerja senantiasa berkonsultasi dan dapat meminta pendapat dari Komite Konsultatif.

Sebagaimana tercantum dalam Keppres Nomor 3 Tahun 2009, dalam mempersiapkan, merumuskan, dan menyusun RPP SAP, Komite Kerja melakukan proses penyiapan standar (*due process*) yang cermat sesuai dengan praktik penyusunan standar yang baik (*best international practices*). Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas KSAP untuk perumusan dan pengembangan SAP, Komite Kerja membentuk Kelompok Kerja yang tata kerja serta keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Komite Kerja. Kelompok Kerja periode tahun 2009 terakhir kali dibentuk dan sebagaimana telah diubah pada tanggal 1 November 2010 dengan KEP-011/K.1/KSAP/XI/2010 beranggotakan 30 orang yang berasal dari berbagai lembaga. Susunan keanggotaan kelompok kerja tersebut sebagai berikut:

1. Margustienny OA, Ak., MBA, Ketua;
2. Firmansyah Nazaroedin, Ak., MBA, Wakil Ketua;
3. Moh. Hatta, Ak., MBA, Anggota;
4. Sumiyati, Ak., MFM, Anggota;
5. Drs. M. Agus Kristianto, Ak., MA, Anggota;
6. Chalimah Puji Astuti, SE, Ak., MAFIS, Anggota;
7. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, Anggota;
8. Mulat Handayani, SE, Ak., Anggota;
9. Hasanuddin, Ak., M.Ak., Anggota;
10. Eli Tamba, SE, Ak., MM, Anggota;
11. Dita Yuvrita, SE, Ak., Anggota;
12. Syaiful, SE, Ak., MM, Anggota;
13. Hamim Mustofa, Ak., Anggota;
14. Sugiyarto, SE., Ak., M.Sc., Anggota.
15. Mhd. Syahman Sitompul, SE, Ak., M.Si., Anggota;
16. Heru Novandi, SE, Ak., Anggota;
17. Muliani Sulya F., SE, Anggota.
18. Andri Fuadhy, SE, Anggota
19. Zulfikar Aragani, Anggota
20. Izharul Haq, SE, M.Fin., Anggota;
21. Tio Novita Efriani, SE, Ak., MGPP, Anggota;
22. Mugiya Wardhani, SE, Ak., MM, Anggota;
23. Rahmat Mulyono, SE, Ak., M.Acc, Anggota.
24. Hari Sugiyanto, Ak. MSc., Anggota;

25. R. Yongki Andrea A., SE, Anggota;
26. Mega Meilistya, SE, Ak., MBA, Anggota;
27. Iskandar Novianto, Ak., M.Si., Anggota;
28. Akhdian Reppawali, Ak., M.Buss., Anggota;
29. Lucia Widiharsanti, SE, M.Si., CFE, Anggota;
30. Edward U.P. Nainggolan, Ak., M.Ak., Anggota;
31. Dr. Mei Ling, SE, Ak., MBA, Anggota; dan
32. Ayu Novita Wulandari, SE, Ak., Anggota.

Selain itu, KSAP juga dibantu oleh Sekretariat KSAP, yang susunan organisasi serta tata kerjanya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan dari Komite Konsultatif. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 547/KMK.06/2004 tentang Sekretariat KSAP dan sebagaimana terakhir telah diubah dengan KMK Nomor 05/KM.5/2010, susunan keanggotaan Sekretariat adalah sebagai berikut:

1. Izharul Haq, SE, M.Fin, Ketua;
2. Hamim Mustofa, Ak., Wakil Ketua;
3. Hari Sugiyanto, Ak. MSc., Anggota;
4. Mega Meilistya, SE, Ak., MBA, Anggota;
5. Farida Aryani, Ak., Anggota;
6. Yulia Candra Kusumarini, S.Sos, Anggota;
7. Andri Fuadhy, SE, Anggota;
8. Zulfikar Aragani, Anggota; dan
9. R. Yongki Andrea A., SE, Anggota.

Sekretariat KSAP yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan bertugas:

1. Memberikan dukungan administratif kepada KSAP dalam rangka penyusunan dan sosialisasi SAP.
2. Mengelola website KSAP.
3. Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan lainnya.



Komite Kerja, Kelompok Kerja dan Sekretariat KSAP dalam acara soft launching PP 71/2010 tentang SAP BerbasisAkrual

BAB II

RENCANA KERJA KSAP



Pertemuan pertama KSAP di Tahun 2010 : Membahas rencana kerja Tahun 2010

A. Kondisi Umum

Sesuai amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 yang antara lain menyebutkan bahwa laporan keuangan pemerintah disusun berdasarkan akuntansi yang standarnya disusun oleh komite standar yang independen, Pemerintah telah membentuk Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP). Berdasarkan Keputusan Presiden, Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) mempunyai tugas untuk mempersiapkan, merumuskan dan menyusun konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (RPP SAP) yang mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang wajib dipatuhi dalam penyajian laporan keuangan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pasal 36 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Begitu pula Pasal 70 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual dilaksanakan selambat-lambatnya pada Tahun Anggaran (TA) 2008, dan selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Untuk memenuhi amanat UU, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah dalam PP Nomor 24 Tahun 2005. SAP dalam PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut menganut basis kas untuk pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja, serta basis akrual untuk pengakuan dan pengukuran aset, kewajiban, dan ekuitas. Basis ini disebut dengan basis kas menuju akrual (*cash towards accrual*). SAP dengan PP Nomor 24 Tahun 2005 tersebut

merupakan standar akuntansi pemerintahan pada masa transisi dari basis kas menuju akrual menjadi basis akrual penuh.

Terkait penerapan akuntansi berbasis akrual, Pemerintah dan DPR sepenuhnya menyadari bahwa masih terdapat banyak kendala sehingga implementasi akuntansi berbasis akrual belum dapat diterapkan sepenuhnya pada tahun 2008. Hal ini mendasari kesepakatan antara Pemerintah dan DPR untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual secara bertahap, terhitung mulai tahun 2009 sesuai dengan kondisi dan kemampuan Indonesia.

Sebagai langkah awal untuk menerapkan akuntansi berbasis akrual, KSAP telah menyusun Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dengan basis akrual dan telah ditetapkan melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 yang mengganti PP Nomor 24 Tahun 2005.

Lingkup dari PP Nomor 71 Tahun 2010 meliputi SAP berbasis akrual dan SAP berbasis kas menuju akrual. SAP berbasis akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. Sementara SAP berbasis kas menuju akrual terdapat pada Lampiran II dan berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual dengan batas waktu masa transisi Tahun Anggaran 2014.

Penyusunan Rencana Strategis KSAP tahun 2011 – 2015 disesuaikan dengan rencana pentahapan implementasi akuntansi berbasis akrual yang dicanangkan oleh Pemerintah. Pada tahun 2011 dan 2012, tantangan dari KSAP adalah penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP), Interpretasi Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (IPSAP) dan Buletin Teknis. IPSAP merupakan penjelasan, klarifikasi, dan uraian lebih lanjut atas Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) sebagaimana tertuang pada PP SAP. Sedangkan Buletin Teknis berisi informasi dan penjelasan teknis akuntansi sebagai pedoman bagi pengguna.

Tugas berikutnya dari KSAP pada periode 2013 – 2015 adalah membantu implementasi SAP pada unit-unit instansi pemerintah, sejalan dengan program uji coba implementasi akuntansi akrual pada tahun 2013, implementasi akuntansi akrual secara paralel pada tahun 2014, serta implementasi akuntansi akrual penuh pada tahun 2015.

B. Rencana Strategis

Rencana strategis suatu organisasi memuat visi, misi dan tujuan yang hendak dicapai. KSAP telah merumuskan rencana strategis dengan visi, misi dan tujuan berikut ini.

Visi :

"Mendukung terwujudnya pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel dan transparan melalui Standar Akuntansi Pemerintahan yang berkualitas."

Misi :

1. Mewujudkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang andal dan diterima secara umum.
2. Mendorong terwujudnya entitas pemerintah yang mampu menghasilkan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Mendorong terwujudnya masyarakat Indonesia yang mampu memahami dan memanfaatkan informasi keuangan.

Tujuan:

Dari visi dan misi di atas, KSAP menetapkan tujuan-tujuan berikut ini:

1. Menyusun standar akuntansi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, praktik dan wacana akuntansi paling mutakhir di Indonesia maupun di lingkungan internasional.
2. Membantu entitas pelaporan menghasilkan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan.
3. Membangun dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan manfaat informasi dalam laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
4. Meningkatkan profesionalisme dan independensi Komite Standar Akuntansi Pemerintahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut, KSAP telah menyusun rencana kerja jangka menengah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 1: Rencana Strategis Tahun 2010 s.d. Tahun 2014

A. Tahun 2010	
1.	Penyusunan SAP Berbasis Akruwal <ol style="list-style-type: none"> 1. Finalisasi SAP Berbasis Akruwal 2. Pembahasan dengan Sekretariat Negara untuk penerbitan PP SAP 3. Penerbitan PP SAP Berbasis Akruwal
2.	Penyusunan Buletin Teknis SAP <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Pembahasan buletin teknis SAP CTA <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Aset Tetap • Buletin Teknis Bantuan Sosial • Buletin Teknis Hibah • Buletin Teknis Aset Tak Berwujud • Buletin Teknis Kas • Buletin Teknis Selisih Kurs • Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan 2. Penyusunan dan Pembahasan buletin teknis SAP Akruwal <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan

		<ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis PNBPN
		3. Penerbitan buletin teknis SAP CTA <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Aset Tetap
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis AkruaI dan Buletin Teknis CTA 2. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 3. Pemeliharaan Website KSAP 4. Penyelenggaraan Help Desk 5. Pelayanan Publik
4.	International Events	Pertemuan <i>Governmental Accounting Standards Setters of ASEAN Member Countries</i>
B. Tahun 2011		
1.	Pengembangan SAP Berbasis AkruaI	Penyusunan PSAP tentang Akuntansi Pendapatan LO
2.	Penyusunan <i>Buletin Teknis SAP</i>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan dan Pembahasan buletin teknis SAP AkruaI <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan LO • Buletin Teknis Akuntansi Beban • Buletin Teknis Akuntansi Piutang • Buletin Teknis Akuntansi Utang • Buletin Teknis Selisih Kurs/Transaksi Mata Uang Asing • Buletin Teknis Bagan Perkiraan Standar (Pempus dan Pemda) 2. Penerbitan buletin teknis SAP CTA <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Bantuan Sosial • Buletin Teknis Hibah • Buletin Teknis Aset Tak Berwujud • Buletin Teknis Kas • Buletin Teknis Selisih Kurs • Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan • Buletin Teknis Akuntansi Penerusan Pinjaman 3. Penerbitan buletin teknis SAP AkruaI <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan • Buletin Teknis PNBPN • Buletin Teknis Akuntansi Beban • Buletin Teknis Akuntansi Piutang • Buletin Teknis Akuntansi Utang
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis AkruaI dan Buletin Teknis CTA 2. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i> 3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 4. Pemeliharaan Website KSAP 5. Penyelenggaraan Help Desk 6. Pelayanan Publik

C. Tahun 2012		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akruar	Pengembangan SAP Berbasis Akruar sesuai dengan kebutuhan
2.	<i>Penyusunan Buletin Teknis SAP</i>	1. Penerbitan buletin teknis SAP <ul style="list-style-type: none"> • Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan LO • Buletin Teknis Akuntansi Beban • Buletin Teknis Akuntansi Piutang • Buletin Teknis Akuntansi Utang • Buletin Teknis Selisih Kurs/Transaksi Mata Uang Asing • Buletin Teknis Bagan Perkiraan Standar (Pempus dan Pemda)
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akruar dan Buletin Teknis CTA 2. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i> 3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 4. Pemeliharaan Website KSAP 5. Penyelenggaraan Help Desk 6. Pelayanan Publik
D. Tahun 2013		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akruar	Pengembangan SAP Berbasis Akruar sesuai dengan kebutuhan
2.	<i>Penyusunan Buletin Teknis SAP</i>	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akruar sesuai dengan kebutuhan
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akruar dan Buletin Teknis CTA 2. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i> 3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 4. Pemeliharaan Website KSAP 5. Penyelenggaraan Help Desk 6. Pelayanan Publik
E. Tahun 2014		
1.	Pengembangan SAP Berbasis Akruar	Pengembangan SAP Berbasis Akruar sesuai dengan kebutuhan
2.	<i>Penyusunan Buletin Teknis SAP</i>	Penyusunan Buletin Teknis SAP Berbasis Akruar sesuai dengan kebutuhan
3.	Pengembangan SDM di Bidang Akuntansi Pemerintahan	1. Sosialisasi/Workshop PP SAP Berbasis Akruar dan Buletin Teknis CTA 2. Pelaksanaan <i>Training of Trainers</i> 3. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP 4. Pemeliharaan Website KSAP 5. Penyelenggaraan Help Desk 6. Pelayanan Publik

Berdasarkan rencana kerja jangka menengah, program kerja dan kegiatan KSAP tahun 2010 adalah sebagai berikut:

1. Finalisasi Draft Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mengamanatkan penerapan pengakuan pendapatan dan belanja berbasis akrual mulai tahun 2008. Untuk itu, mulai tahun 2006, KSAP telah menyusun draf SAP Berbasis Akrua. Pada tahun 2010, KSAP merencanakan menyelesaikan draf Kerangka Konseptual dan draf PSAP Berbasis Akrua dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. Indikator kegiatan ini berupa terselesaikannya draf Kerangka Konseptual dan draf PSAP Berbasis Akrua. Pada tahun 2010, sasaran kinerja KSAP adalah finalisasi draf kerangka konseptual dan 12 (dua belas) draf SAP Berbasis Akrua.

2. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2010 ini, KSAP merencanakan menyusun beberapa buletin teknis dalam rangka mendukung implementasi SAP Berbasis Kas Menuju Akrua (PP Nomor 24 Tahun 2005 yang telah dicabut dengan PP Nomor 71 Tahun 2010). Topik-topik yang dipilih berdasarkan prioritas kebutuhan para *stakeholders*. Buletin teknis ini disusun untuk memberikan arahan/pedoman penerapan PSAP maupun IPSAP. Indikator kinerja kegiatan ini adalah telah diterbitkannya Buletin Teknis.

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

a. Workshop Buletin Teknis SAP

SAP harus diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah. Untuk itu, pada tahun 2010, KSAP akan mengadakan *workshop* mengenai buletin teknis yang telah diterbitkan. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2010.

b. Pengembangan Kemampuan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP berbasis akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktik akuntansi baik untuk internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

c. Pemeliharaan Website KSAP

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP.

Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya.

d. Penyelenggaraan *Help Desk*

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP membentuk *helpdesk* yang akan menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP, kemudian KSAP akan berusaha memberikan pemecahannya.

e. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

4. *International Events*

Pada tahun 2010, KSAP merencanakan menyelenggarakan *international events* dengan mengundang institusi penyusun standar negara-negara ASEAN dan sekaligus mengusulkan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggaraan *IPSAS Board Meeting*.



Andreas Bergman narasumber pada International Events "Government Accounting Standards-Setters Meeting of ASEAN Member Countries" yang diadakan oleh KSAP di Tahun 2010

BAB III

KINERJA KSAP



Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Akruwal) sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Berbasis Kas Menuju Akruwal)

A. Capaian Kinerja

Tahun 2010 merupakan masa yang penting bagi perkembangan akuntansi pemerintahan di Indonesia, karena pada tahun 2010 Peraturan Pemerintah (PP) yang mengatur mengenai SAP Berbasis Akruwal telah diterbitkan, yaitu PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai pengganti PP Nomor 24 Tahun 2005. SAP Berbasis Akruwal yang ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut merupakan *output* penting yang dihasilkan oleh KSAP pada tahun 2010. Selain SAP Berbasis Akruwal, sampai dengan akhir tahun 2010, KSAP telah menetapkan 1 (satu) Buletin Teknis yaitu Buletin Teknis No. 09 tentang Akuntansi Aset Tetap. Ringkasan capaian kinerja KSAP pada tahun 2010 adalah:

- Finalisasi Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- Finalisasi draf SAP Berbasis Akruwal yang terdiri dari Kerangka Konseptual dan 12 PSAP setelah mendapat pertimbangan dari BPK;
- Penetapan Buletin Teknis SAP No. 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;
- Penyusunan 5 (lima) draf buletin teknis, yaitu Buletin Teknis tentang Akuntansi Bantuan Sosial, Buletin Teknis tentang Akuntansi Hibah, Buletin Teknis tentang Akuntansi Aset Tetap, Buletin Teknis tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud, dan Buletin Teknis tentang Akuntansi Penerusan Pinjaman.

- Sosialisasi awal PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP pada tanggal 14 Desember 2010.
- Penyelenggaraan *Workshop* Buletin Teknis SAP tanggal 16 Desember 2010;
- Penyelenggaraan international event, yaitu *Governmental Accounting Standard Setters-Meeting of ASEAN Member Countries* di Bali, tanggal 5-6 Agustus 2010 dan *The IPSAS Board Meeting* di Jakarta tanggal 1-4 November 2010.
- Pengembangan SDM dengan mengirim SDM KSAP untuk mengikuti berbagai seminar, kongres dan konferensi akuntansi baik di luar maupun dalam negeri; dan
- Sosialisasi SAP pada beberapa Pemda dan Perguruan Tinggi.
- Pelayanan Publik menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait permasalahan akuntansi pemerintahan baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Finalisasi Draft Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 mengatur bahwa pengukuran pendapatan dan belanja dengan basis akrual dilakukan selambat-lambatnya tahun 2008. Oleh karena itu, sesuai dengan rencana lima tahunan, KSAP telah menyelesaikan penyusunan draft SAP Berbasis Akrua yang terdiri dari draft Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan dan 12 draft SAP Berbasis Akrua dengan menggunakan pendekatan menyesuaikan PSAP *cash toward accrual* (sesuai PP Nomor 24 Tahun 2005) dengan PSAP berbasis akrual yang diadaptasi dari IPSAS dan berbagai literatur lainnya. SAP Berbasis Akrua ini pada tanggal 22 Oktober 2010 ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP. Dengan ditetapkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 ini maka PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Namun demikian, PP 71 Tahun 2010 selain mengatur SAP Berbasis Akrua, juga mengatur SAP Berbasis Kas Menuju Akrua yang semula diatur dalam PP 24 Tahun 2005.

Pernyataan SAP Berbasis Akrua yang telah ditetapkan dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 tersebut adalah:

1. Penyajian Laporan Keuangan;
2. Laporan Realisasi Anggaran;
3. Laporan Arus Kas;
4. Catatan atas Laporan Keuangan;
5. Akuntansi Persediaan;
6. Akuntansi Investasi;
7. Akuntansi Aset Tetap;
8. Akuntansi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
9. Akuntansi Kewajiban;

10. Koreksi Kesalahan Mendasar, Perubahan Estimasi dan Kebijakan Akuntansi, Kesalahan Mendasar dan Pos Luar Biasa;
11. Laporan Keuangan Konsolidasian; dan
12. Laporan Operasional.

Berikut adalah proses selengkapnya penyusunan draf SAP Berbasis AkruaI hingga penetapannya dalam PP Nomor 71 Tahun 2010:

Kegiatan	Waktu
1. <i>Hearing</i> Penyusunan SAP Berbasis AkruaI pada Tahun 2006	19 Desember 2006
2. Penyusunan dan Pembahasan Draf Awal SAP Berbasis AkruaI	Januari 2006 – Maret 2008
3. Pembahasan Draf Awal SAP Berbasis AkruaI dengan Tim Penelaah BPK	April 2008
4. Rapat Audiensi dengan Menteri Keuangan tentang SAP Berbasis AkruaI	14 Agustus 2008
5. Rapat Konsultasi antara Pemerintah dengan DPR	25 September 2008
6. <i>Hearing</i> SAP Berbasis AkruaI	3 November 2008
7. Penyusunan Draf SAP Berbasis AkruaI	Desember 2008
8. Permohonan Pertimbangan atas SAP Berbasis AkruaI dari Menteri Keuangan kepada Ketua BPK	31 Desember 2008
9. Penerimaan Pertimbangan SAP Berbasis AkruaI dari BPK	25 Februari 2009
10. Pembahasan Draf SAP Berbasis AkruaI dengan BPK	Maret-Mei 2009
11. Penyampaian tanggapan terhadap Pertimbangan BPK atas Draf SAP Berbasis AkruaI	4 Juni 2009
12. Penyusunan Draf Final SAP Berbasis AkruaI	Juni-Juli 2009
13. Penyusunan RPP SAP Berbasis AkruaI	Juli 2009
14. Penyampaian RPP SAP Berbasis AkruaI dari Menteri Keuangan kepada Menteri Hukum dan HAM	24 Agustus 2009
15. Pembahasan/harmonisasi RPP SAP Berbasis AkruaI dengan Kementerian Hukum & HAM	November – Mei 2009
16. Perbaikan RPP SAP berdasarkan hasil rapat harmonisasi	Juni
17. Penyampaian RPP SAP dari Menteri Keuangan kepada Menteri Sekretaris Negara	29 Juli 2010
18. Permintaan Paraf pada Naskah Asli RPP SAP dari Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Keuangan	26 Agustus 2010
19. Penyampaian Naskah Asli RPP SAP yang telah diparaf dari Menteri Keuangan kepada Menteri Sekretaris Negara	05-10-2010
20. Penetapan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang SAP	22 Oktober 2010

2. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam tahun 2010, KSAP telah menetapkan 1 (satu) buah buletin teknis yaitu Buletin Teknis Nomor 9 tentang Akuntansi Aset Tetap. Dengan demikian, sampai

dengan akhir tahun 2010, KSAP telah menerbitkan 9 (sembilan) buletin teknis dan 1 (satu) Interpretasi Pernyataan SAP (IPSAP), yaitu:

1. Buletin Teknis Nomor 01 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Pusat;
2. Buletin Teknis Nomor 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah;
3. Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemda Sesuai SAP dengan Konversi;
4. Buletin Teknis Nomor 04 tentang Penyajian dan Pengungkapan Belanja;
5. Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan;
6. Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang;
7. Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir;
8. Buletin Teknis Nomor 08 tentang Akuntansi Utang;
9. Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap;
10. IPSAP Nomor 01 tentang Transaksi Dalam Mata Uang Asing

Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset Tetap merupakan Bultek SAP yang terbit tahun 2010 yang bertujuan sebagai petunjuk teknis Pernyataan Standar Akuntansi tentang Aset Tetap



Disamping itu, terdapat beberapa buletin teknis yang dikembangkan dan hingga akhir tahun 2010 sedang dalam proses pembahasan. Beberapa draf buletin teknis SAP tersebut adalah sebagai berikut:

1. Buletin Teknis tentang Bantuan Sosial;
2. Buletin Teknis tentang Hibah;
3. Buletin Teknis tentang Aset Tak Berwujud;
4. Buletin Teknis tentang Penerusan Pinjaman;
5. Buletin Teknis tentang Akuntansi Selisih Kurs;
6. Buletin Teknis tentang Akuntansi Kas; dan
7. Buletin Teknis tentang Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia dalam Bidang Akuntansi Pemerintahan

Kegiatan 1: Workshop Buletin Teknis : Akuntansi Penyusutan, Akuntansi Piutang Akuntansi Dana Bergulir, dan Akuntansi Utang

Pada tahun 2010 ini, KSAP telah menyelenggarakan *Workshop* SAP dan Buletin Teknis SAP No. 9 tentang Akuntansi Aset Tetap, Buletin Teknis SAP No. 5 tentang Akuntansi Penyusutan, Draft Buletin Teknis SAP tentang Belanja Bantuan Sosial, Buletin Teknis SAP No. 6 tentang Akuntansi Piutang, dan Buletin Teknis SAP No. 7 tentang Akuntansi Dana Bergulir. *Workshop* tersebut diadakan pada tanggal 16 Desember 2010 di Bandung. *Workshop* ini bertujuan untuk melakukan sosialisasi atas 3 (tiga) buah

buletin teknis yang diterbitkan tahun 2008 yaitu Buletin Teknis Nomor 05 tentang Akuntansi Penyusutan, Buletin Teknis Nomor 06 tentang Akuntansi Piutang, dan Buletin Teknis Nomor 07 tentang Akuntansi Dana Bergulir, 1 (satu) buah buletin teknis yang diterbitkan tahun 2010 yaitu Buletin Teknis Nomor 09 tentang Akuntansi Aset tetap, serta sosialisasi draf Buletin Teknis tentang Belanja Bantuan Sosial. *Workshop* ini dihadiri para praktisi baik dari lingkungan pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) maupun dari kementerian lembaga/negara yang melaksanakan penyusunan laporan keuangan pemerintah.



Workshop Buletin Teknis SAP yang diselenggarakan di Bandung 16 Desember 2010

Kegiatan 2: Pengembangan Kemampuan SDM KSAP

Di bidang pengembangan SDM, KSAP mengirim beberapa anggotanya mengikuti seminar, kongres, dan konferensi baik di dalam negeri maupun luar negeri, antara lain:

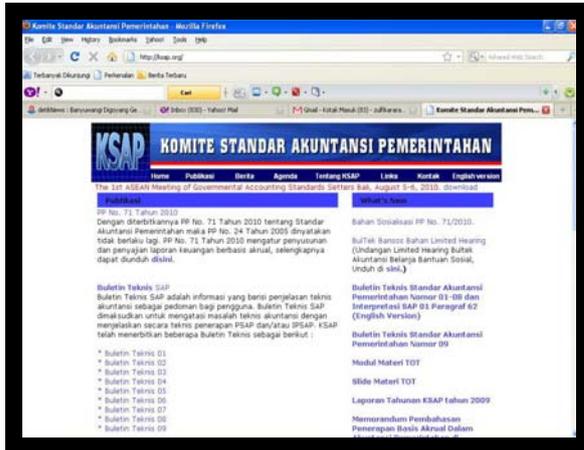
- Studi Banding Praktik Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual pada Pemerintah Amerika Serikat, tanggal 25-30 April 2010.
- *Pan Pacific Congress (PPC)* ke-25, di Bali tanggal 27-30 September 2010
- World Congress of Accountants, di Kuala Lumpur Malaysia tanggal 8-11 November 2010.
- Kongres XI Ikatan Akuntansi Indonesia, Jakarta tanggal 9 Desember 2010.



Duta KSAP bersama Wakil Pemerintah Amerika Serikat pada studi banding praktik Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual

Kegiatan 3: Pemeliharaan *Website* KSAP

Dalam rangka memberi informasi mengenai organisasi KSAP dan produk standar akuntansi yang dihasilkan, KSAP telah membangun *Website* KSAP dengan alamat: <http://www.ksap.org> yang dikelola oleh Sekretariat KSAP sejak Juli 2004. Pengembangan *Website* ditujukan untuk mengekspose PSAP dan Draf PSAP dan berbagai informasi penting lainnya yang diperlukan para pengunjung *website*. Pada *website* tersebut juga tersedia email para anggota KSAP.



Tampilan muka *Website* KSAP :
www.ksap.org
 sebagai media sosialisasi KSAP yang menjembatani KSAP dengan Stakeholder KSAP

Kegiatan 4: Penyelenggaraan *Help Desk*

SAP merupakan hal yang baru bagi para penyusun laporan keuangan pemerintah dan pengguna SAP lainnya. Untuk membantu para pengguna SAP dalam memahami maupun menerapkannya, KSAP telah membentuk tim *helpdesk* yang terdiri dari beberapa anggota Komite Kerja dan Kelompok Kerja yang bertugas menampung pertanyaan-pertanyaan/kesulitan-kesulitan yang dialami para pengguna SAP dan memberikan pemecahannya.

Kegiatan 5: Pelayanan Publik

Pada tahun 2010, KSAP telah memenuhi beberapa permintaan dari berbagai instansi antara lain dari instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya untuk menjadi nara sumber tentang SAP. Selain itu, KSAP juga membantu memberikan konsultasi teknis atas implementasi SAP kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, yaitu:

- Perlakuan KSO Penambangan Pasir Lumajang dari Pemerintah Kabupaten Lumajang;
- Perlakuan akuntansi kas dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- Perlakuan Akuntansi atas Risk Sharing dalam Laporan Keuangan dari Direktorat Sistem Manajemen Investasi-Ditjen Perbendaharaan;
- Perlakuan akuntansi terhadap Uang Pengganti dari Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Perlakuan akuntansi piutang dari Pemerintah Kabupaten Nganjuk;

- Penjelasan Perlakuan Akuntansi atas Konsolidasi Laporan Arus Kas BLUD ke Laporan Arus Kas Pemda dan Belanja Pengeluaran untuk Aset Tetap yang akan Diserahkan Kepada Pihak Lain dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- Pencatatan atas Aset hasil PNPM Mandiri pada SIMAK BMN dari BPKP; dan
- Perlakuan akuntansi atas kas di bendahara pengeluaran, investasi, dan aset tetap dari Pemerintah Kota Tangerang.



Diskusi KSAP dengan SPAN terkait Implementasi SAP Berbasis Akrua di Lingkungan Pemerintah Pusat

4. International Events

Tahun 2010 merupakan tahun yang istimewa bagi KSAP karena KSAP berhasil dengan sukses menyelenggarakan 2 kegiatan penting yang bersifat internasional.

Pada tanggal 5-6 Agustus 2010, KSAP menyelenggarakan ***“The Meeting of Governmental Accounting Standards Setters of ASEAN Member Countries.”*** Acara tersebut diikuti oleh 9 negara ASEAN sebagai delegasi (23 orang) dan 3 negara sebagai pengamat (Malaysia, Australia, dan Korea Selatan), dan pengamat dalam negeri (15 orang).

Beberapa kesepakatan yang dihasilkan dari *Meeting* tersebut adalah:

1. Pembentukan suatu forum diskusi diantara *governmental accounting standards setters* negara-negara ASEAN untuk membahas pengembangan dan penerapan standar akuntansi pemerintahan yang mengacu pada *international best practices*.
2. Pertukaran pengalaman antar negara ASEAN dalam penerapan standar akuntansi pemerintahan.



Foto bersama delegasi ASEAN Meeting di Bali, 5-6 Agustus 2010

Pada tanggal 1-4 November 2010, KSAP dipercaya sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan **“The IPSAS Board Meeting”**. Bertempat di Hotel Alila Jakarta acara tersebut diikuti oleh para anggota IPSAS Board dan merupakan agenda rutin IPSAS Board dalam membahas isu-isu terkait akuntansi sector public.

Dalam tahun 2010 ini pula, KSAP mendapat hibah berupa terjemahan Buletin Teknis SAP dalam Bahasa Inggris oleh Pemerintah Swiss. Bultek SAP yang diterjemahkan adalah Bultek SAP Nomor 01 s.d. 08. Penerjemahan ini sebagai upaya melengkapi terjemahan Standar Akuntansi Pemerintah yang telah terlebih dahulu diterjemahkan pada tahun 2008.



Serah terima hibah Pemerintah Swiss berupa terjemahan Buletin Teknis SAP dalam Bahasa Inggris

C. Aspek Keuangan

Untuk melaksanakan kegiatan tahun 2010, KSAP mendapatkan alokasi dana APBN sebesar Rp4.575.393.000 yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) KSAP – Kementerian Keuangan. Dari anggaran tersebut, KSAP telah merealisasikan sebesar Rp4.147.141.522 atau 85,04% dari pagu anggaran.

Berikut ini adalah rincian anggaran dan realisasi belanja KSAP Tahun Anggaran 2010:

Kode Jenis Belanja	Uraian Jenis Belanja	Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
51	Belanja Pegawai	-	-	-
52	Belanja Barang	4.355.393.000	3.960.865.597	90,94%
53	Belanja Modal	220.000.000	186.275.925	84,67%
Jumlah		4.575.393.000	4.147.141.522	90,64%

Laporan Keuangan KSAP Tahun 2010, selaku satuan kerja, secara lengkap dapat dilihat pada Lampiran.

D. Kendala dan Strategi Pemecahannya

Pada tahun 2010, terdapat beberapa buletin teknis yang direncanakan dapat diselesaikan dan diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2010 tidak dapat dicapai. Hal ini disebabkan prioritas KSAP pada tahun 2010 adalah menyelesaikan SAP berbasis akrual dan masih diperlukannya kajian yang lebih mendalam agar buletin teknis tersebut dapat diimplementasikan dengan baik. Selain itu, selama tahun 2010, KSAP juga banyak menerima pertanyaan/konsultasi dari berbagai unit instansi baik tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait permasalahan implementasi SAP yang harus dibahas secara hati-hati dan memerlukan waktu pembahasan yang cukup panjang. Untuk mengatasi kendala-kendala tersebut, KSAP telah membentuk tim-tim kecil yang bertugas mengkaji dan menjawab atas pertanyaan/konsultasi dari berbagai instansi pemerintah.

BAB IV

RENCANA KERJA TAHUN 2011

Untuk mendukung implementasi SAP tahun 2010 dan pengembangan SAP berbasis akrual, pada tahun 2010 KSAP merencanakan melakukan kegiatan sebagai berikut:

1. Penyusunan PSAP

Pada tahun 2011, KSAP akan melakukan penyusunan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual, yaitu Akuntansi Pendapatan Laporan Operasional (LO). PSAP ini akan melengkapi PSAP yang telah ditetapkan dengan PP Nomor 71 Tahun 2010.

2. Penyusunan Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan

Pada tahun 2011, KSAP akan melakukan penyusunan/penerbitan buletin teknis SAP baik SAP Berbasis Kas Menuju Akrual maupun SAP Berbasis Akrual. Tujuan dari penyusunan buletin teknis adalah untuk memberikan penjelasan yang mendalam tentang SAP Berbasis Kas Menuju Akrual dalam menyusun laporan keuangan, sehingga para pengguna dapat memahami dan melaksanakan SAP dengan baik.

Buletin teknis SAP Berbasis Akrual yang akan disusun adalah:

- 1). Buletin Teknis Akuntansi Pendapatan LO
- 2). Buletin Teknis Akuntansi Beban
- 3). Buletin Teknis Akuntansi Piutang
- 4). Buletin Teknis Akuntansi Utang
- 5). Buletin Teknis Selisih Kurs/Transaksi Mata Uang Asing
- 6). Buletin Teknis Bagan Perkiraan Standar (Pempus dan Pemda)

Buletin teknis SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yang akan diterbitkan adalah:

- 1). Buletin Teknis Bantuan Sosial
- 2). Buletin Teknis Hibah
- 3). Buletin Teknis Aset Tak Berwujud
- 4). Buletin Teknis Kas
- 5). Buletin Teknis Selisih Kurs
- 6). Buletin Teknis Pendapatan Perpajakan
- 7). Buletin Teknis Akuntansi Penerusan Pinjaman

3. Sosialisasi, *Workshop*, dan *Training of Trainers* SAP Berbasis Akrual dan Buletin Teknis Baru SAP Berbasis Kas Menuju Akrual

Pada tahun 2011, KSAP akan mengadakan sosialisasi dan *workshop* mengenai SAP Berbasis Akrual dan buletin teknis baru SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. Dengan diadakannya kegiatan ini, diharapkan para pengguna SAP dapat memahami dan mampu menerapkannya dalam penyusunan laporan keuangan. Selain itu, pada tahun 2011, KSAP juga merencanakan mengadakan *Training of Trainers* mengenai SAP Berbasis Akrual.

4. Pengembangan SDM KSAP

Untuk menunjang pelaksanaan tugasnya, khususnya dalam menyusun SAP Berbasis Akrual, KSAP perlu meningkatkan kemampuan personilnya. Selain melakukan pengkajian standar dan praktek akuntansi baik internasional maupun di Indonesia, KSAP juga mempunyai rencana mengirimkan para anggotanya untuk mengikuti seminar/kongres/konferensi baik di dalam maupun di luar negeri.

5. Pemeliharaan *Website* KSAP

Pada tahun 2004, KSAP telah membuat *website* KSAP yang berguna untuk mengkomunikasikan kepada publik mengenai kondisi, kegiatan dan *output* KSAP. Agar *website* tersebut tetap mengkomunikasikan informasi yang *up to date* yang berkaitan dengan KSAP kepada publik, maka KSAP perlu memelihara *website*-nya. Para pengunjung dapat mendownload dan mengajukan pertanyaan melalui email KSAP yang tersedia dalam situs www.ksap.org.

6. Pemeliharaan *Helpdesk*

Tim *Helpdesk* yang telah dibentuk akan terus melakukan tugasnya pada tahun 2010. Diharapkan dari penyelenggaraan *helpdesk* ini akan dibuat suatu Buku *Frequently Asked Question* (FAQ) yang memuat pertanyaan/permasalahan dan jawaban/pemecahan permasalahan seputar implementasi SAP.

7. Pelayanan Publik

Pelayanan publik ini ditujukan untuk memberikan pelayanan yang berupa pengajaran, konsultasi, dan lain-lain kepada instansi pemerintah pusat/daerah, lembaga pendidikan, dan lembaga publik lainnya.

BAB V

PENUTUP

Laporan Tahunan 2010 ini merupakan laporan pertanggungjawaban KSAP dan diharapkan dapat dijadikan sebagai media evaluasi, khususnya bagi KSAP dan pihak-pihak yang berkepentingan. Masukan dari berbagai pihak baik mengenai substansi standar, interpretasi, buletin teknis, bantuan implementasi, program sosialisasi dan hal-hal lainnya dapat diberikan kepada KSAP agar di masa mendatang KSAP dapat meningkatkan kinerjanya dalam mengembangkan dan menyusun standar akuntansi pemerintahan serta memberi dukungan teknis implementasi SAP sehingga dapat mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.



Pemukulan Gong oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan yang juga merupakan Ketua Komite Konsultatif KSAP pada acara Soft Launching PP N0. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang sekaligus menandakan mulai berlakunya penerapan SAP Berbasis AkruaI dalam akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah: suatu tantangan tersendiri bagi KSAP untuk dapat mendukung kesuksesan dan mengawal Implementasi SAP Berbasis AkruaI



Kesekretariatan KSAP :
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III Lantai 2
Jalan Budi Utomo No. 6 Jakarta Pusat, 10710
Telp.Fax: 021-3524551
www.ksap.org